



PEMERINTAH
KOTA BANJAR

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2025



Badan Pengelolaan
Keuangan dan
Pendapatan Daerah



 (0265) 742661

 bpkpd.bjr@banjarkota.go.id

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di samping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2025 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Banjar Tahun 2025 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa kami nantikan untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Banjar, 17 September 2025

Kepala BPKPD,



ASEP MULYANA, S.E., M.M.

Pembina Tk.I / IVb

NIP. 19761004 200312 1 004

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.3.1 Maksud	9
1.3.2 Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	33
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	43
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	47
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	59
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	60
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	60
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	62
3.3 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	66
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	81
BAB V PENUTUP	91

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 : Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
- Gambar 1.2 : Keterkaitan Dokumen Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan
- Gambar 1.3 : Tindak Lanjut Renja Dalam Penyusunan APBD

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024
- Tabel 2.2 : Jumlah ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Berdasarkan Pangkat
- Tabel 2.3 : ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
- Tabel 2.4 : ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Tabel 2.5 : Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor
- Tabel 2.6 : Daftar Kendaraan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar
- Tabel 2.7 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Banjar
- Tabel 2.8 : Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025
- Tabel 3.1 : Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPKPD Tahun 2025
- Tabel 3.2 : Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Banjar
- Tabel 4.1 : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

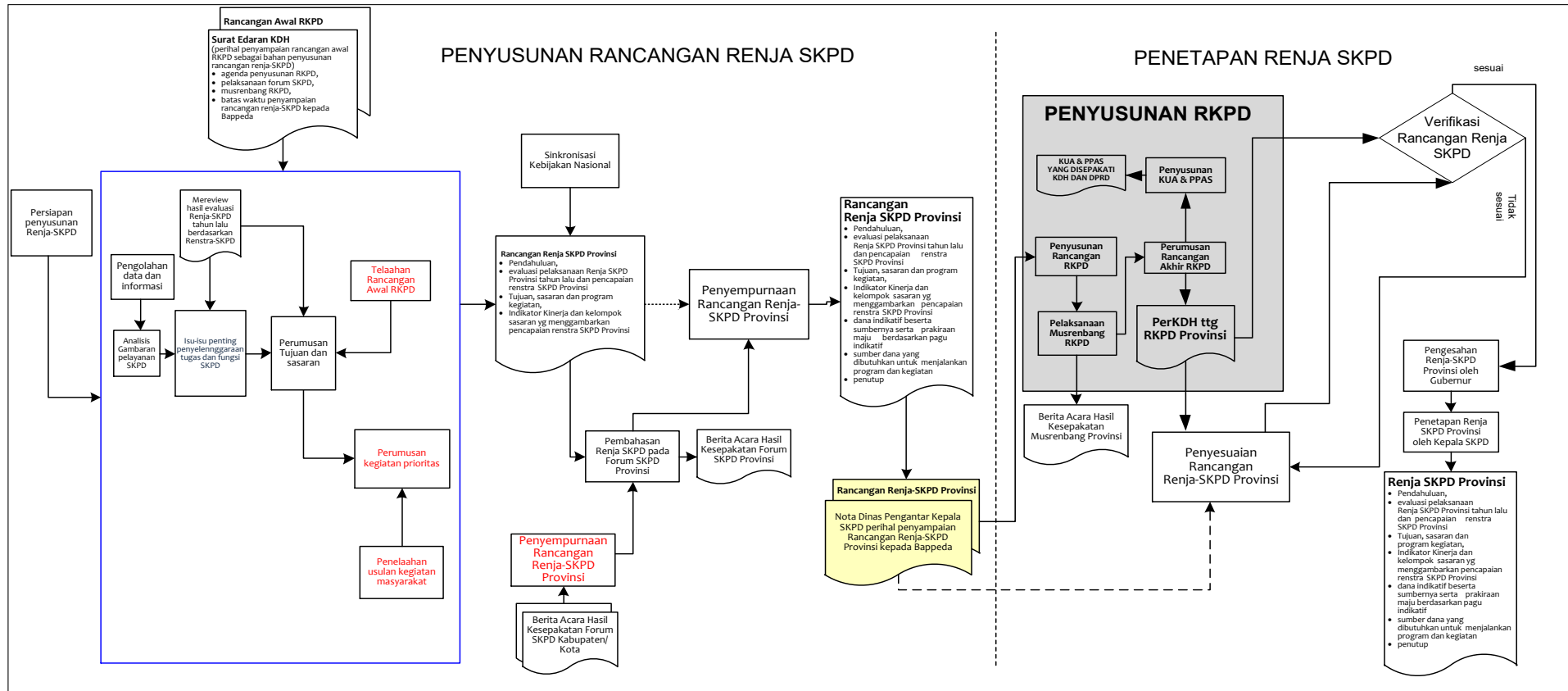
Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan akhir RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan akhir RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

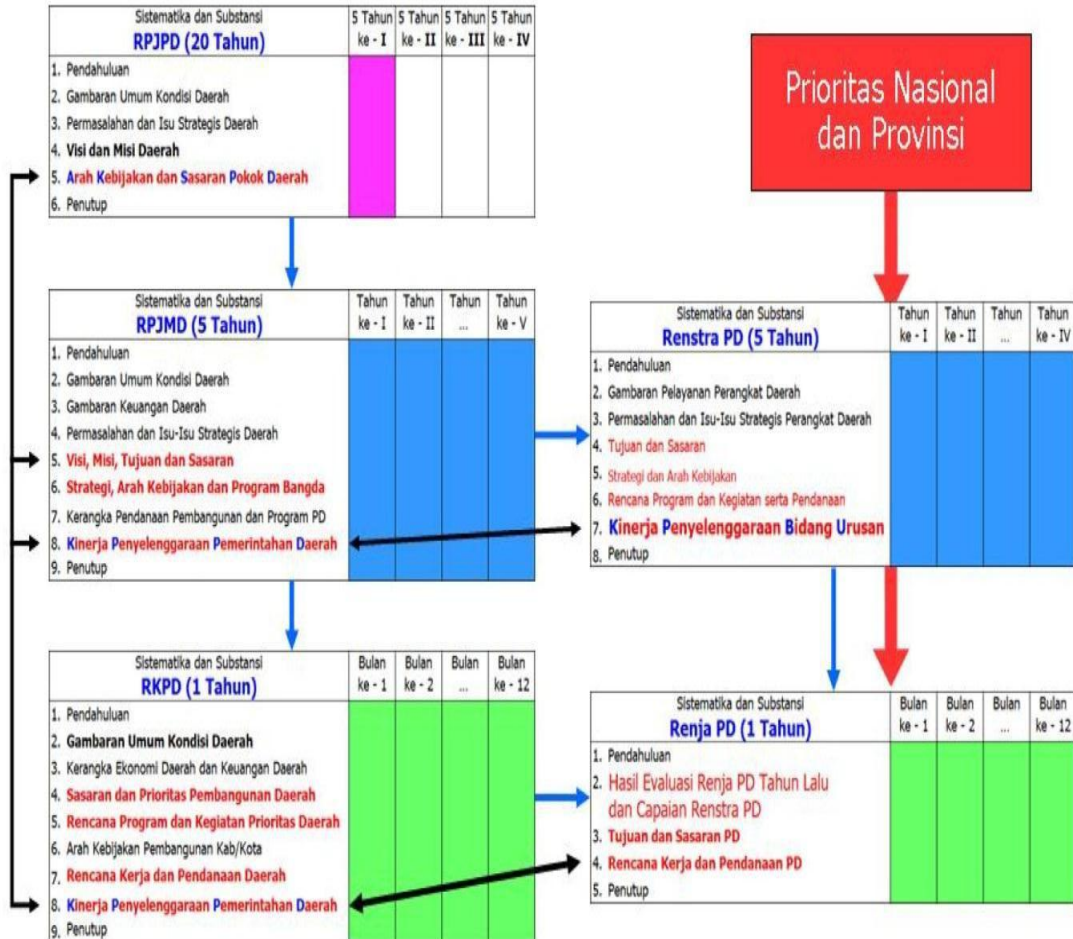
Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Banjar.

Di bawah ini bagan alir proses penyusunan rancangan Renja Perangkat daerah :



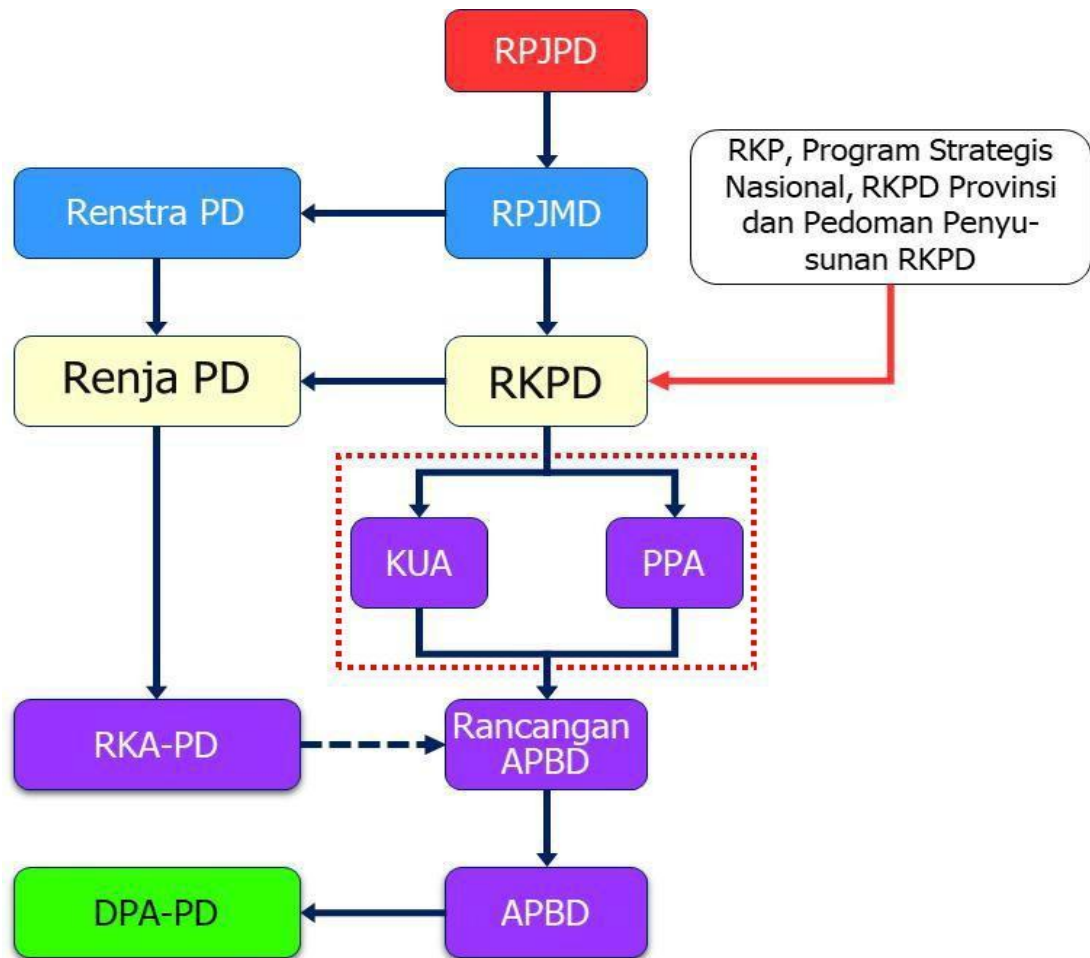
Gambar 1.1
 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Adapun keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja kota, sebagaimana tergambar sebagai berikut:



Gambar 1.2
Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan proses penyusunan RAPBD adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3
Tindak Lanjut Renja Dalam Penyusunan APBD

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 581);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi ,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi ,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
38. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5);
40. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar;

41. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjar, (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 1);
42. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 6.a Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 6.a);
43. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah.
44. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2023 Nomor 33).
45. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2025 Nomor 33).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja BPKPD Kota Banjar Tahun 2025 ini adalah menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan;
2. Sebagai perubahan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
3. Sebagai sarana pengendalian perubahan program dan kegiatan Tahun 2025;

4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL PELAKSANAAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi

APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,

asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah lainnya yang langsung ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah, paling sedikit mencakup urusan/program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja, penerima manfaat, pagu indikatif, pagu perkiraan maju, sumber anggaran baik yang mengalami perubahan maupun tidak.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
- c. Rencana tindak lanjut,

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar selama Tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025. Untuk lebih jelasnya di bawah ini disajikan tabel Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sampai dengan Tahun 2024

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA BPKPD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN					
			Tahun 2024-2026	Tahun 2022	TARGET RENJA PD TAHUN 2023	REALISASI RENJA PD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=10/4				
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02	KEUANGAN												
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	300 %	154 %	100 %	100 %	100 %	100 %	33,33 %			
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300 %	141 %	100 %	100 %	100 %	33,33 %			
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	2 Dok	3 Dok	3 Dok	100 %	2 Dok	2 Dok	28,57 %
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dok	2 Dok	0 Dok	2 Dok	100 %	2 Dok	2 Dok	33,33 %
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dok	2 Dok	0 Dok	2 Dok	100 %	2 Dok	2 Dok	33,33 %

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA BPKPD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN							
							Tahun 2024-2026		Tahun 2022		TARGET RENJA PD TAHUN 2023		REALISASI RENJA PD TAHUN 2023		TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)					
1						3	4		5		6	7		8=(7/6)	9	10		11=10/4				
5	02	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6	Dok	4	Dok	2	Dok	2	Dok	100	%	2	Dok	2	Dok	33,33	%
5	02	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6	Dok	2	Dok	0	Dok	2	Dok	100	%	2	Dok	2	Dok	33,33	%
5	02	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	Lap	12	Lap	8	Lap	8	Lap	100	%	8	Lap	8	Lap	33,33	%
5	02	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Lap	2	Lap	4	Lap	4	Lap	100	%	4	Lap	4	Lap	33,33	%
5	2	1	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	300	%	178	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	33,33	%
30	2	1	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	177	Orang /Bln	50	Orang/ Bln	53	Orang/ Bln	55	Orang/ Bln	100	%	56	Orang/ Bln	56	Orang/ Bln	94,92	%
5	2	1	2.02	02		Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			32	Orang												

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA BPKPD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN							
							Tahun 2024-2026		Tahun 2022		TARGET RENJA PD TAHUN 2023		REALISASI RENJA PD TAHUN 2023		TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)				
1						3	4		5		6		7	8=(7/6)	9	10		11=10/4				
5	2	1	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	1050	Dok	539	Dok	350	Dok	639	Dok	182,57	%	350	Dok	1101	Dok	104,86	%
5	2	1	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Lap	4	Lap	2	Lap	2	Lap	100	%	2	Lap	2	Lap	33,33	%
5	2	1	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			12	Lap												
5	2	1	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	300	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	33,33	%
5	2	1	2.03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1	Dok												
5	2	1	2.03	02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9	Dok			3	Dok	3	Dok	100	%	1	Dok	1	Dok	11,11	%
5	02	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			6	Lap												

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA BPKPD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN		
							Tahun 2024-2026	Tahun 2022	TARGET RENJA PD TAHUN 2023	REALISASI RENJA PD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1						3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=10/4	
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 Lap							
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300 %	68 %	100 %	100 %	100 %	100 %	%	33,33 %	
5	2	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	522 Stel	3 Paket				261 Stel	Stel	%	
5	2	1	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		50 Dok						%	
5	2	1	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	154 Dok	50 Dok	53 Dok	53 Dok	100 %	12 Dok	12 Dok	33,33 %	
5	2	1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	26 Org					90 Org	Org	%	
5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Org	0 Orang				3 Org	Org	%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA BPKPD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN									
							Tahun 2024-2026		Tahun 2022		TARGET RENJA PD TAHUN 2023	REALISASI RENJA PD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)								
1					2		3		4		5		6		7		8=(7/6)		9		10		11=10/4	
5	02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	300	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	33,33	%	
5	02	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	Paket	18	Paket	12	Paket	12	Paket	100	%	12	Paket	12	Paket	33,33	%	
5	02	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	Paket	18	Paket	12	Paket	12	Paket	100	%	12	Paket	12	Paket	33,33	%	
5	02	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36	Paket	18	Paket	6	Paket	8	Paket	133	%	12	Paket	12	Paket	33,33	%	
5	02	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	Paket	18	Paket	12	Paket	12	Paket	100	%	12	Paket	12	Paket	33,33	%	
5	02	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36	Paket	18	Paket	1	Paket	1	Paket	100	%	12	Paket	12	Paket	33,33	%	
5	02	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	324	Dok	18	Dok	66	Dok	66	Dok	100	%	132	Dok	0	Dok		%	
5	02	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	Lap	15	Lap	12	Lap	12	Lap	100	%	12	Lap	12	Lap	33,33	%	
5	02	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Lap	18	Lap	12	Lap	12	Lap	100	%	12	Lap	12	Lap	33,33	%	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA BPKPD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
			Tahun 2024-2026		Tahun 2022		TARGET RENJA PD TAHUN 2023	REALISASI RENJA PD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=10/4		
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36 Dok	18 Dok	12 Dok	12 Dok	100 %	12 Dok	12 Dok	33,33 %		
5 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						6 Dok	6 Dok	%		
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	33,33 %		
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	30 Paket				10 Unit	10 Unit	%		
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	54 Unit	59 Unit	18 Unit	18 Unit	100 %	9 Unit	9 Unit	16,67 %		
5 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	42 Unit	11 Unit	11 Unit	100 %	5 Unit	0 Unit	%		
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300 %	150 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	33,33 %		
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Lap	18 Lap	12 Lap	12 Lap	100 %	12 Lap	12 Lap	33,33 %		
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Lap	18 Lap	12 Lap	12 Lap	100 %	12 Lap	12 Lap	33,33 %		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA BPKPD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN		
						Tahun 2024-2026	Tahun 2022	TARGET RENJA PD TAHUN 2023	REALISASI RENJA PD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=10/4
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300 %	155 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	33,33 %
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	102 Unit	34 Unit	29 Unit	29 Unit	100 %	25 Unit	25 Unit	24,51 %
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						5 Unit	5 Unit	%
5	02	01	2.09	04	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara						44 Unit	0 Unit	%
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	137 Unit	81 Unit	81 Unit	100 %	127 Unit	127 Unit	70,56 %
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	6 Gdg	2 Unit	2 Unit	100 %	3 Unit	3 Unit	20,00 %
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	2 Unit	2 Unit	100 %	2 Unit	2 Unit	33,33 %

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA BPKPD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
			Tahun 2024-2026		Tahun 2022	TARGET RENJA PD TAHUN 2023	REALISASI RENJA PD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=10/4	
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan Pengelolaan Keuangan Daerah	300 %		381 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	33,33 %
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	300 %		114 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	33,33 %
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	6 Dok		2 Dok	2 Dok	2 Dok	100 %	2 Dok	2 Dok	33,33 %
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	6 Dok		2 Dok	2 Dok	2 Dok	100 %	2 Dok	2 Dok	33,33 %
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	90 Dok		40 Dok	30 Dok	30 Dok	100 %	30 Dok	30 Dok	33,33 %
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	90 Dok		80 Dok	30 Dok	30 Dok	100 %	30 Dok	30 Dok	33,33 %
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	90 Dok		70 Dok	30 Dok	30 Dok	100 %	30 Dok	30 Dok	33,33 %
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	90 Dok		40 Dok	30 Dok	30 Dok	100 %	30 Dok	30 Dok	33,33 %
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dok		6 Dok	2 Dok	2 Dok	100 %	2 Dok	2 Dok	33,33 %

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA BPKPD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
			Tahun 2024-2026	Tahun 2022	TARGET RENJA PD TAHUN 2023	REALISASI RENJA PD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=10/4
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6 Dok	4 Dok	2 Dok	2 Dok	100 %	2 Dok	2 Dok	33,33 %
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		1 Dok				1 Dok	1 Dok	%
5 02 02 2.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						100 Org	100 Org	%
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	300 %	146 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	33,33 %
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	228 Dok	108 Dok	76 Dok	76 Dok	100 %	76 Dok	76 Dok	33,33 %
5 02 02 2.02 02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 Lap						%
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	234 Dok	320 Dok	78 Dok	78 Dok	100 %	78 Dok	78 Dok	33,33 %

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA BPKPD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
							Tahun 2024-2026	Tahun 2022	TARGET RENJA PD TAHUN 2023	REALISASI RENJA PD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2					3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=10/4
5 02 02 2.02 05	Kordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dok	25 Dok	11 Dok	11 Dok	100 %	4 Dok	4 Dok	33,33 %
5 02 02 2.02 06	Kordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		3 Dok						%
5 02 02 2.02 07	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	144 Lap	54 Lap	10 Lap	10 Lap	100 %	48 Lap	48 Lap	33,33 %

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA BPKPD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
			Tahun 2024-2026	Tahun 2022	TARGET RENJA PD TAHUN 2023	REALISASI RENJA PD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=10/4
5 02 02 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		14 Dok						%
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	114 Dok	57 Dok	38 Dok	38 Dok	100 %	38 Dok	38 Dok	33,33 %
5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	15 Dok	5 Dok	4 Dok	4 Dok	100 %	5 Dok	5 Dok	33,33 %
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	360 Orang	80 Orang	60 Orang	60 Orang	100 %	120 Orang	120 Orang	33,33 %

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA BPKPD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
			Tahun 2024-2026	Tahun 2022	TARGET RENJA PD TAHUN 2023	REALISASI RENJA PD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=10/4
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	300 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	33,33 %
5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah						12 Lap	12 Lap	%
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban						1 Dok	1 Dok	%
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	36 Lap	36 Lap	25 Lap	25 Lap	100 %	12 Dok	12 Dok	33,33 %
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	246 Lap	162 Lap	85 Lap	85 Lap	100 %	82 Dok	82 Dok	33,33 %

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA BPKPD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
			Tahun 2024-2026	Tahun 2022	TARGET RENJA PD TAHUN 2023	REALISASI RENJA PD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=10/4
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6 Dok	3 Dok	2 Dok	2 Dok	100 %	2 Dok	2 Dok	33,33 %
5 02 02 2.03 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD								
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3 Dok	5 Dok	3 Dok	3 Dok	100 %	1 Dok	1 Dok	33,33 %
5 02 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		3 Dok						%
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota								%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA BPKPD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
			Tahun 2024-2026		Tahun 2022		TARGET RENJA PD TAHUN 2023	REALISASI RENJA PD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=10/4		
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	300 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	33,33 %	
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3 Lap	16 Lap	1 Lap	1 Lap	100 %	1 Lap	1 Lap	1 Lap	33,33 %	
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100 %	1 Lap	1 Lap	1 Lap	33,33 %	
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	48 Lap	16 Lap	16 Lap	16 Lap	100 %	16 Lap	16 Lap	16 Lap	33,33 %	
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	300 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	%	
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	300 %	166 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	33,33 %	
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	3 Dok	3 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	1 Dok	1 Dok	33,33 %	
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	6 Dok	4 Dok	2 Dok	2 Dok	100 %	2 Dok	2 Dok	2 Dok	33,33 %	
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	100 %	4 Lap	4 Lap	4 Lap	33,33 %	
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah						1 Lap	1 Lap	1 Lap	%	
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	65 Lap	63 Lap	70 Lap	123 Lap	176 %	10 Lap	10 Lap	10 Lap	15,38 %	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024- 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA BPKPD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
			Tahun 2024- 2026		Tahun 2022		TARGET RENJA PD TAHUN 2023	REALISASI RENJA PD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=10/4		
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	27 Dok	11 Dok	9 Dok	12 Dok	133 %	9 Dok	9 Dok	40,74 %		
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	15 Lap	5 Lap	6 Lap	7 Lap	117 %	6 Lap	6 Lap	40,00 %		
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	6 Lap	1 Lap	2 Lap	2 Lap	100 %	2 Lap	2 Lap	33,33 %		
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						41 Org	41 Org	%		
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Cakupan Pengelolaan Pendapatan Daerah	300 %	75,0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	33,33 %		
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Pengelolaan Pendapatan Daerah	300 %	143,0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	33,33 %		
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100 %	2 Dok	2 Dok	33,33 %		
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dok	5 Dok	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	1 Dok	33,33 %		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024- 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA BPKPD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
			Tahun 2024- 2026		Tahun 2022		TARGET RENJA PD TAHUN 2023	REALISASI RENJA PD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=10/4		
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Lap	1 Lap	1 Lap	3 Lap	300 %	4 Lap	4 Lap	33,33 %		
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	275 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	1 Unit	33,33 %		
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Lap	6 Lap	4 Lap	4 Lap	100 %	1 Lap	1 Lap	33,33 %		
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		1 Lap						%		
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya								%		
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dok	10 Dok	3 Dok	3 Dok	100 %	1 Dok	1 Dok	33,33 %		
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		2572 Layan						%		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA BPKPD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN		
							Tahun 2024-2026	Tahun 2022	TARGET RENJA PD TAHUN 2023	REALISASI RENJA PD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1						3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=10/4	
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		1 Dok							%
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3 Dok	1 Dok	4 Dok	4 Dok	100 %	1 Dok	1 Dok	33,33 %	
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		1 Dok							%
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	3 Dok	1 Dok	3 Dok	4 Dok	133,33 %	1 Dok	1 Dok	33,33 %	
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		1 Lap							%

Penjelasan Tabel 2.1

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Tahun 2024 merupakan masa transisi sehingga Pemerintah Kota Banjar menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun sementara, untuk mengisi kekosongan perencanaan jangka menengah ketika kepala daerah definitive belum dilantik, sehingga belum disusun RPJMD. Pemerintah Kota Banjar telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banjar Tahun 2024-2026. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banjar Tahun 2024-2026 sebagai acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Tahun 2024 merupakan tahun pertama implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. Adapun capaian realisasi kinerja pada Tahun 2024 adalah sebesar 33,33% dari target kinerja Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar. Dengan demikian, untuk mengukur program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan hanya dapat diukur setelah berakhirnya periode pelaporan kinerja Renstra yaitu setelah berakhirnya tahun 2026.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. Adapun capaian realisasi kinerja pada Tahun 2024 adalah sebesar 33,33% dari target kinerja Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar. Dengan demikian, untuk mengukur program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan hanya dapat diukur setelah berakhirnya periode pelaporan kinerja Renstra yaitu setelah berakhirnya tahun 2026.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. Adapun capaian realisasi kinerja pada Tahun 2024 adalah sebesar 33,33% dari target kinerja Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar. Dengan demikian, untuk mengukur program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

hanya dapat diukur setelah berakhirnya periode pelaporan kinerja Renstra yaitu setelah berakhirnya tahun 2026.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

Tahun 2024 merupakan tahun pertama implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. Adapun capaian realisasi kinerja pada Tahun 2024 adalah sebesar 33,33% dari target kinerja Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar. Dengan demikian, untuk mengukur faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan hanya dapat diukur setelah berakhirnya periode pelaporan kinerja Renstra yaitu setelah berakhirnya tahun 2026.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan RPD Transisi akan memiliki target capaian yang bersifat sementara, kurang optimal, dan berisiko tinggi untuk direvisi. Hal ini dapat memengaruhi efektivitas program, efisiensi anggaran, serta keselarasan dengan kebijakan kepala daerah yang definitif nantinya.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Banjar Tahun 2024-2026;
- b. Sinkronisasi dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah dengan dokumen RPD, RKPD, Rencana Kerja, dokumen RPJPD Kota Banjar serta Prioritas Nasional;
- c. Penentuan target capaian program secara realistis dan terukur;
- d. Penguatan koordinasi dan konsultasi teknis dengan perangkat daerah terkait dalam hal ini Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjar.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 3 (Ayat) 1 dan 2 Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 128 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, BPKPD Kota Banjar mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi badan;
- f. Pembinaan ASN pada badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 128 Tahun 2021, disebutkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar merupakan tipe A yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang. Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahkan:
 - 1) Subbidang Pendataan dan Pelayanan;
 - 2) Subbidang Penetapan dan Pengolahan Data;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Kelompok Jabatan Pelaksana.

- d. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran I;
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Anggaran II;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Kas Daerah
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan I;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang AKLAP I;
 - 2) Sub Bidang AKLAP II; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Kelompok Jabatan Pelaksana.
- g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan;
 - 2) Sub Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Kelompok Jabatan Pelaksana.
- h. Jabatan Fungsional;

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Perangkat Daerah

- a. Sumber Daya Manusia Aparatur memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun data Sumber Daya Manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar.

Tabel 2.2
Jumlah ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Berdasarkan Pangkat

No	Golongan	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Pejabat Administrator	Pejabat Pengawas	Fungsional	Pejabat Pelaksana	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
Pegawai Negeri Sipil (PNS)							
1	I	-	-	-	-	-	-
2	II	-	-	-	-	2	2
3	III	-	-	8	7	24	39
4	IV	1	6	3	-	-	10
Sub Jumlah		1	6	11	7	26	51
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)							
5	I	-	-	-	-	10	10
6	V	-	-	-	-	15	15
7	VII	-	-	-	1	3	4
8	IX	-	-	-	3	17	20
Sub Jumlah		-	-	-	4	45	49
Jumlah		1	6	11	11	71	100

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar berdasarkan golongan/ ruang mayoritas Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki golongan III sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang, golongan II sebanyak 2 (dua) orang, serta golongan IV sebanyak 10 (sepuluh) orang. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) golongan I sebanyak 10 (Sepuluh) orang, V sebanyak 15 (lima belas) orang, VII sebanyak 4 (empat) orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) golongan IX sebanyak 20 (dua puluh) orang.

Tabel 2.3
ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
Pegawai Negeri Sipil (PNS)				
1	I	-	-	-
2	II	2	-	2
3	III	22	17	39
4	IV	6	4	10
Sub Jumlah I		30	21	51

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)				
5	I	10	-	10
6	V	10	5	15
7	VII	3	1	4
8	IX	10	10	20
Sub Jumlah II		33	16	49
Jumlah		63	37	100

Berdasarkan jenis kelaminnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar mayoritas berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang, sedangkan sisanya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang berjenis kelamin perempuan.

Tabel 2.4
ASN pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	SD	10	-	10
2	SLTP	-	-	-
3	SLTA	15	5	20
4	D-3	6	2	8
5	D-4	-	1	1
6	S-1	26	22	48
7	S-2	6	7	13
Jumlah		63	37	100

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya, sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar berpendidikan SD sebanyak 10 (Sepuluh) orang, SLTA sebanyak 20 (dua puluh) orang, Sarjana Muda (D-3) sebanyak 8 (delapan) orang, D-4 sebanyak 1 (satu) orang, Sarjana (S-1) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang, dan Magister (S-2) sebanyak 13 (tiga belas) orang.

b. Aset/Modal

Secara umum sarana dan prasarana yang tersedia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar cukup memadai, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	2	3	4	5	6
1	Transportable Generating Set	1	1		-
2	P.C Unit	65	43		22
3	Lap Top	17	14	2	1
4	Note Book	5	5	-	-
5	Tablet PC	32	13		19
6	Personal Komputer lainnya	2	2		-
7	Plotter (Peralatan Mainframe)	1	1		-
8	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	3	3		-
9	Monitor	8	8		-
10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	78	42	13	23
11	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	1	2	-
12	Peralatan Personal Komputer lainnya	3	3	-	-
13	Server	10	10	-	-
14	Router	1	1	-	-
15	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	1	-	
16	MiniBus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	8	8	-	-
17	Pick Up	1	1	-	-
18	Sepeda Motor	19	19	-	-
19	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	1	1	-	-
20	alat ukur universal lainnya (dst)	3	-	-	3
21	Scanner (Universal Tester)	7	7	-	-
22	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	10	10	-	-
23	Rak-Rak Penyimpan	4	4	-	-
24	Mesin Fotocopy Electronic	6	6	-	-
25	Lemari Kayu	8	3	-	5
26	Rak Besi	32	32	-	-
27	Rak Kayu	7	7	-	-
28	Filing Cabinet Besi	19	19	-	-
29	Brandkas	5	5	-	-
30	CCTV - Camera Control Television System	6	6	-	-
31	Papan Visual/Papan Nama	49	48	-	1
32	Alat Penghancur Kertas	7	1	-	6
33	Mesin Absensi	1	-	-	1
34	Perforator Besar	2	1	-	1
35	Overhead Projector	1	1	-	-
36	LCD Projector/Infocus	1	1	-	-
37	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	1	-	-
38	Papan Nama Instansi	135	135	-	-
39	Papan Pengumuman	106	106	-	-
40	Alat Kantor Lainnya	1	1	-	-
41	Meja Kerja Kayu	31	31	-	-

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	2	3	4	5	6
42	Kursi Besi/Metal	13	13	-	-
43	Meja Rapat	23	23	-	-
44	Meja Resepsionis	2	2	-	-
45	Meja 1/2 Biro	35	35	-	-
46	Kursi Rapat	116	72	-	44
47	Kursi Tamu	4	2	-	2
48	Kursi Putar	15	-	-	15
49	Kursi Biasa	28	10	-	18
50	Sofa	15	13	1	1
51	Meubeleur lainnya	1	1	-	-
52	Mesin Pemotong Rumput	3	2	-	1
53	Lemari Es	2	2	-	-
54	A.C. Window	15	10	-	5
55	A.C. Split	33	11	2	20
56	Kipas Angin	2	-	2	-
57	Televisi	5	2	-	3
58	Loudspeaker	2	-	1	1
59	Sound System	2	-	1	1
60	Wireless	1	-	-	1
61	Camera Video	1	1	-	-
62	Tangga Aluminium	1	1	-	-
63	Dispenser	2	1	-	1
64	Coffee Maker	2	2	-	-
65	Alat Pemadam/Portable	11	11	-	-
66	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	4	-	-
67	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15	15	-	-
68	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10	10	-	-
69	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	-	1	4
70	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14	1	-	13
71	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	41	30	-	11
72	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	5	-	-
73	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	19	19	-	-
74	Lemari Arsip Pejabat lainnya	4	4	-	-
75	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3	-	3	-
76	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	-	-	1
77	Camera Electronic	1	1	-	-
78	Facsimile	1	1	-	-
79	alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	1	1	-	-
80	Stabilizer	1	1	-	-
81	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	1	1	-	-
82	Generator	1	1	-	-
	Jumlah	1.162	910	28	224

Tabel 2.6

Daftar Kendaraan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar

No	Jenis Kendaraan	Merk	Ukuran/ cc	No Polisi	
				Lama	Baru
1	2	3	4	5	6
1	Pick Up	Suzuki / Carry 1,5 Pick Up Flat Deck	1493		Z 8048 X
2	Mini Bus	Toyota / Kijang Inova	1998		Z 1272 X
3	Mini Bus	Toyota / Avanza Type 1.5 M/T Veloz	1495	Z 155 X	Z 1816 X
4	Mini Bus	Toyota / Avanza Type 1.5 M/T Veloz	1495	Z 156 X	Z 1817 X
5	Mini Bus	Suzuki / Suzuki Futura ST 120	1.493		Z 302 X
6	Mini Bus	Toyota / Avanza Veloz 1.5 M/T	1.495		Z 1136 X
7	Mini Bus	Toyota / Avanza Veloz 1.5 M/T	1495		Z 1151 X
8	Mini Bus	Toyota / Avanza Veloz 1.5 Mt	1495		Z 1196 X
9	Mini Bus	Toyota / Kijang Inova 2.0g At (Tgn140r Mdtskd)	1998		Z 15 X
10	Mini Bus	Toyota / Kijang Grand Long KF 83	2446		Z 1276 X
11	Sepeda Motor	Yamaha / Vega-R	110		Z 2335 X
12	Sepeda Motor	Yamaha / Vega R	110		Z 2286 X
13	Sepeda Motor	Yamaha / Vega R	110		Z 2581 X
14	Sepeda Motor	Yamaha / Vega R	110		Z 2378 X
15	Sepeda Motor	Yamaha / Vega R 3p9	110		Z 2221 X
16	Sepeda Motor	Yamaha / Vega R	110		Z 2451 X
17	Sepeda Motor	Yamaha / Vega R/3p9	110		Z 2485 X
18	Sepeda Motor	Yamaha / Vega R/3p9	110		Z 2360 X
20	Sepeda Motor	Yamaha / Vega R 110 Cc 4d7	110		Z 2031 X
21	Sepeda Motor	Honda / Revo	110		Z 2758 X
22	Sepeda Motor	Honda / Revo	110		Z 2759 X
23	Sepeda Motor	Honda / Revo	110		Z 2762 X
24	Sepeda Motor	Honda Revo / Cw	110		Z 2835 X
25	Sepeda Motor	Honda / Nc1183ca/T	108		Z 2846 X
26	Sepeda Motor	Honda / Nc11a3ca/T	108		Z 2847 X
27	Sepeda Motor	Honda Vario	108		Z 2857 X
28	Sepeda Motor	Honda Vario Cbs125 Iss / Nc12af2cbi A/T (Vario Cbs Iss)	125		Z 3098 X
29	Sepeda Motor	Honda Vario Cbs125 Iss / Nc12af2cbi A/T (Vario Cbs Iss)	125		Z 3103 X

No	Jenis Kendaraan	Merk	Ukuran/ cc	No Polisi	
				Lama	Baru
1	2	3	4	5	6
30	Sepeda Motor	Honda Vario Cbs125 Iss / Nc12af2cbi A/T (Vario Cbs Iss)	125		Z 3116 X
31	Sepeda Motor	Honda Vario Cbs125 Iss / Nc12af2cbi A/T (Vario Cbs Iss)	125		Z 3095 X

c. Inovasi Perangkat Daerah

Berikut beberapa inovasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar:

1. Pembayaran pajak daerah secara *online*, yaitu melalui website:
 - pajakdaerah.banjarkota.go.id untuk pajak reklame, hotel dan restoran;
 - ests.banjarkota.go.id untuk pembayaran retribusi daerah;
 - pembayaran melalui QRIS.
 - SIMPBB, SIMBPHTB, SIMPDL.
2. Pemasangan Tapping Box di Hotel, Restoran, dan Tempat Hiburan.
3. Aplikasi PAIS PEDDA Digital (pelayanan pengajuan Surat Perintah Membayar, pengajuan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran/ SKPP, penyampaian laporan Daftar Transaksi Harian/DTH, penyampaian usulan Standar Biaya Umum/SBU dan Standar Satuan Harga/SSH).
4. SAUNG APBD (permohonan penyaluran Dana Transfer ke Desa berbasis *papperless*).
5. Aplikasi SIMSALABIMD (Sistem Informasi Pelaporan Barang Milik Daerah).

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Pemerintah Kota Banjar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah			-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	- Penetapan APBD			-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
	- Realisasi Belanja APBD			-	93%	94%	95%	95,24%	92,64%	94%	95%	
	- LKPD sesuai dan tepat waktu			-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	- Penetapan RAPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
	- Laporan BMD sesuai dan tepat waktu			-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Realisasi Pajak Daerah			-	100%	100%	100%	100,48%	97,79%	100%	100%	
	- Pertumbuhan Pajak Daerah			-	2,5%	2,5%	2,5%	3,84%	23,32%	2,5%	2,5%	
3	Kategori SAKIP OPD			-	BB 73,08	BB 74,08	BB 76,08	BB 72,02	BB 73,51	BB 74,08	BB 76,08	
	- Pertumbuhan Nilai SAKIP OPD			-	0,8%	1%	2%	1,17%	2,07%	1%	2%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja sasaran perangkat daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Banjar tahun 2024-2026 yaitu:

1. Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah.

Indikator ini digunakan untuk mendukung terhadap tujuan ke-1 pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2026 yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, dengan sasaran ke-1.1 yaitu Terwujudnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel. Berdasarkan tabel di atas, Indikator Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah pada BPKPD Kota Banjar Tahun Anggaran 2024 terdiri dari: Penetapan APBD dengan target Tepat Waktu, Realisasi Belanja APBD dengan target 93%, LKPD sesuai dan tepat waktu dengan target 100%, Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan target Tepat Waktu dan Laporan BMD sesuai dan tepat waktu dengan target 100%. Adapun pada Tahun 2024, realisasi Penetapan APBD adalah tepat waktu, Realisasi belanja APBD adalah sebesar 92,64%, LKPD sesuai dan tepat waktu Adalah 100%, Penetapan RAPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah tepat waktu, dan Laporan BMD sesuai dan tepat waktu adalah sebesar 100%.

2. Realisasi Pajak Daerah

Indikator ini digunakan untuk mendukung terhadap tujuan ke-2 pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2026 yaitu Membangun Perekonomian Masyarakat yang Maju dan Inklusi, dengan sasaran 2.2 yaitu Optimalisasi Potensi PAD. Indikator Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 pada BPKPD Kota Banjar adalah Pertumbuhan Pajak Daerah dengan target 2,5%. Adapun capaian kinerja realisasi pajak daerah pada Tahun 2024 adalah sebesar 97,79%.

3. Kategori Nilai SAKIP OPD

Indikator ini digunakan untuk mendukung terhadap tujuan ke-1 pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2026 yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, dengan sasaran ke-1.1 yaitu Terwujudnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel. Indikator Kinerja SAKIP OPD Tahun Anggaran 2024 pada BPKPD Kota Banjar adalah Pertumbuhan Nilai SAKIP OPD dengan target 0,8%. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2023 Nomor: R/700.1.2.1/51/Itda/2024 Tanggal 6 Mei 2024, kategori nilai SAKIP OPD pada tahun 2024 adalah memperoleh nilai sebesar 73,51 dengan kategori “BB” dengan interpretasi “Sangat Baik”. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30%	27,15	26,32
2	Pengukuran Kinerja	30%	18,62	18,98
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,88	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	15,37	16,66
	Jumlah	100%	72,02	73,51

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintah yang diselenggarakan, BPKPD memiliki lingkup layanan yang luas. Sebagai fungsi penunjang urusan keuangan, BPKPD memberikan pelayanan dalam proses penyusunan APBD, penatausahaan keuangan, penatausahaan barang milik daerah, pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD, serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, BPKPD didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Berikut capaian kinerja atas pelayanan, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Banjar maupun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

a. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Realisasi kinerja program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2024 dengan capaian kinerja 100% atau dengan predikat kinerja “sangat tinggi”, sehingga tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKPD Kota Banjar sebagai berikut:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar mempunyai tugas pokok fungsi penunjang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan Kebijakan Teknis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 2) Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 3) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dukungan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 4) Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Fungsi-Fungsi Penunjang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 5) Pelaksanaan Administrasi Badan;
- 6) Pembinaan ASN pada Badan; dan
- 7) Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan oleh Wali Kota Terkait Dengan Tugas dan Fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Permasalahan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan (gap) antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Selain itu, permasalahan juga dapat dimaknai sebagai kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Rumusan permasalahan diperoleh dari hasil identifikasi data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa dalam menjalankan fungsi pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar menghadapi beberapa isu strategis yang harus di antisipasi dan dikelola. Isu-isu strategis tersebut dapat menjadi hambatan maupun peluang bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan dan meningkatkan pelayanan dan berpengaruh secara langsung terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Namun demikian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berusaha secara optimal agar hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan sehingga dapat mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan. Kriteria yang

dikembangkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam menentukan isu-isu yang ada menjadi isu strategis antara lain meliputi:

- 1) Pengaruhnya terhadap Visi dan Misi Pemerintah Kota Banjar;
- 2) Merupakan tupoksi organisasi;
- 3) Memiliki dampak terhadap pelayanan publik;
- 4) Memiliki dampak terhadap laporan keuangan (Opini BPK);
- 5) Memiliki dampak terhadap pembangunan;
- 6) Tingkat kesulitan untuk diantisipasi;

Dalam upaya mencapai target kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, pada pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan dalam pelayanan yang dihadapi diantaranya sebagai berikut:

- 1) Rendahnya kemampuan fiskal daerah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD serta dapat menyebabkan keterlambatan bahkan kegagalan dalam mencapai target;
- 2) Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola keuangan serta pengelola barang milik daerah pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Banjar belum optimal;
- 3) Belum optimalnya kinerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam upaya meminimalisir permasalahan yang ada diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pajak daerah, pemutakhiran data wajib pajak, identifikasi, pendataan terhadap subjek dan objek pajak baru, pemasangan alat rekam pajak serta penambahan channel pembayaran pajak daerah.
- 2) Melakukan desk penyusunan rencana anggaran kas disesuaikan dengan proyeksi penerimaan kas pada seluruh perangkat daerah;
- 3) Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Banjar;
- 4) Membuat inovasi pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah maupun pengelolaan pajak daerah dalam upaya mendukung capaian kinerja;

- 5) Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil PAD serta melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak baik secara langsung maupun melalui media sosial;

c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Banjar

Adapun dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Banjar diantaranya sebagai berikut:

- 1) Rendahnya kemampuan fiskal pemerintah daerah menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan;
- 2) Belum meratanya kompetensi SDM seluruh perangkat daerah berdampak pada proses pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan pendapatan daerah tidak berjalan optimal;
- 3) Belum optimalnya kinerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdampak pada kinerja pelayanan pada perangkat daerah.

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

1) Tantangan dalam meningkatkan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, meliputi:

- a) Rendahnya kemampuan fiskal daerah yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD serta dapat menyebabkan keterlambatan bahkan kegagalan dalam mencapai target;
- b) Belum optimalnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan dan barang milik daerah pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Banjar;
- c) Semakin menguatnya komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota Banjar untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government* seiring dengan agenda reformasi birokrasi.

2) Peluang dalam meningkatkan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, meliputi:

1. Penggalian potensi pendapatan asli daerah (PAD) dalam upaya memaksimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
2. Peningkatan kompetensi SDM aparatur pengelola keuangan daerah;

3. Inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
4. Peningkatan layanan kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak daerah, yaitu dengan melakukan pembayaran secara *online*.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan hambatan yang telah diuraikan di atas, maka isu-isu strategis yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar sebagai berikut:

- 1) Upaya optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber pendapatan lainnya, serta meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah;
- 2) Pengelolaan anggaran daerah secara efektif dan efisien serta pengendalian belanja daerah agar sesuai prioritas pembangunan daerah;
- 3) Peningkatan kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang akurat, transparan, dan tepat waktu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- 4) Peningkatan pengelolaan aset daerah yang meliputi inventarisasi, pemanfaatan serta pengamanan aset daerah;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan.

Pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini, terdapat perubahan maupun penambahan program dan kegiatan, hal tersebut didasari oleh Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta hasil analisis kinerja serta kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar 2024-2026 dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Banjar Tahun 2024-2026.

Tabel 2.8
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

NO	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
	KEUANGAN					85.160.020.675,00	KEUANGAN				86.137.720.293,00	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKPD	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	11.659.774.185,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKPD	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	11.134.682.401,00		
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	15.500.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	7.755.500,00	Berkurang karena efisiensi anggaran	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.299.900,00		
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.579.500,00		
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.582.500,00		
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	621.600,00		
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	621.600,00		
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	2.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	947.000,00		

NO	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.103.400,00	
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	8.864.472.212,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKPD	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	8.954.109.746,00	Bertambahnya Insentif Tw III karena belum teranggarkan dan penambahan P3K sebanyak 45 orang serta Bertambahnya operasional untuk kegiatan verifikasi penatausahaan keuangan baik sebagai SKPD maupun SKPKD seperti verifikasi SPM LS Barang dan Jasa, SPM GU, SPM LS Bankeu Ke Desa seperti LS ADD, TU BTT, LS BHPRD
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/Bulan	8.806.306.652,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/Bulan	8.867.303.846,00	
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	350 Dokumen	53.165.560,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	350 Dokumen	81.868.500,00	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	4.937.400,00	
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPKPD	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	39.222.500,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPKPD	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	59.715.000,00	Bertambahnya untuk Optimalisasi Pengamanan dan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Gedung Pertemuan

NO	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	39.222.500,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	37.930.000,00	
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	21.785.000,00	
05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKPD	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	53.668.400,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKPD	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	32.657.000,00	Berkurang karena ditiadaknya alokasi anggaran untuk bimbingan teknis
01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKPD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	54 Stel	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKPD	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	54 Dokumen	28.668.400,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100 Dokumen	32.657.000,00	
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 Orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	25.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	-	
06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	538.712.100,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	497.243.180,00	Bertambahnya operasional yaitu untuk cetak blangko SP2D; belanja toner dalam penatausahaan / pelaporan selaku SKPD dan SKPKD; Bertambahnya pengamanan arsip SP2D
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	41.197.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	41.197.000,00	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	23.900.680,00	
04	Penyediaan Bahan	BPKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik	12 Paket	30.420.900,00	Penyediaan Bahan Logistik	BPKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik	12 Paket	35.420.000,00	

NO	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Logistik Kantor		Kantor yang Disediakan			Kantor		Kantor yang Disediakan			
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	86.014.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	94.614.000,00	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	5.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	45 Dokumen	2.025.000,00	
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.670.000,00	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	216.889.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	157.500.000,00	
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	43.191.200,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	43.259.500,00	
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	66.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	67.657.000,00	
07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKPD	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	65.953.073,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKPD	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	104.527.000,00	Pengadaan mebeler P3K 9 Orang; Rak Arsip 10 Unit; SarPras Bidang Pendapatan PC Dekstop 3unit Printer 1 unit
05	Pengadaan Mebel	BPKPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	-	Pengadaan Mebel	BPKPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	54.297.000,00	
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	65.953.073,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	50.230.000,00	
07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	
08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.503.006.900,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	771.228.175,00	Berkurangnya alokasi anggaran internet dan Jasa Pelayanan Umum Kantor
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	788.644.800,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	400.026.000,00	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	714.362.100,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	371.202.175,00	

NO	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	579.239.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPD	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	707.446.800,00	Bertambahnya untuk pemeliharaan server yaitu server pelayanan pajak, server pengajuan dan pelaporan Bankeu ke Desa dan server penatausahaan dan laporan Barang Milik Daerah; Bertambahnya pemeliharaan gedung pertemuan BCH GBI
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	301.674.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	301.639.600,00	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	78.555.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	78.525.000,00	
05	Pemeliharaan Mebel	BPKPD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	44 Unit	10.000.000,00	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	44 Unit	-	
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	89.010.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	188.180.000,00	
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	60.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	104.594.000,00	
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	40.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	34.508.200,00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKPD	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	43,33	71.528.884.490,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKPD	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	44,11	73.274.051.733,00	
			Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	90,90				Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	90,91		
			Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	5,19				Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	3,1		
			Opini Laporan Keuangan	WTP				Opini Laporan Keuangan	WTP		
			Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	0,4				Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	0,3		

NO	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100				Persentase Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100		
01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKPD	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	1.049.743.650,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKPD	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	387.796.425,00	Berkurang karena efisiensi anggaran
01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKPD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	119.956.500,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKPD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	34.601.250,00	
02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	119.974.250,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	65.826.500,00	
03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPPKAD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	103.629.500,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	2.486.500,00	
04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	102.776.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	21.414.500,00	
05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	91.921.500,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	53.398.700,00	
06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	62.860.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	27.429.500,00	
07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	218.424.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	78.512.400,00	
08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	155.402.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	79.002.500,00	
09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKPD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	49.942.300,00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKPD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	18.624.575,00	
13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	24.856.300,00	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	6.500.000,00	

NO	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKPD	Cakupan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	473.559.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKPD	Cakupan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	425.083.500,00	Berkurang karena efisiensi anggaran
01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	76 Dokumen	101.463.200,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	76 Dokumen	98.716.700,00	
03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	78 Dokumen	70.503.800,00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	78 Dokumen	70.503.800,00	
05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	138.464.000,00	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	114.095.300,00	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKPD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	48 Laporan	36.377.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKPD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	48 Laporan	40.337.000,00	
09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	38 Dokumen	59.071.800,00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	38 Dokumen	50.191.800,00	
10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKPD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5 Dokumen	8.810.000,00	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKPD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5 Dokumen	8.810.000,00	
11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	58.869.200,00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	42.428.900,00	

NO	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKPD	Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	319.786.650,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKPD	Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	299.530.500,00	Berkurang karena efisiensi anggaran
01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	33.602.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	33.534.400,00	
02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	19.554.400,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	19.428.000,00	
03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	17.621.150,00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	17.621.000,00	
04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	82 Laporan	144.160.200,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	82 Laporan	129.948.200,00	
05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	78.622.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	72.886.000,00	
06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKPD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	10.000.000,00	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKPD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	9.886.000,00	
07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	16.226.900,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	16.226.900,00	

NO	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD	Cakupan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	69.685.795.190,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD	Cakupan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	72.161.641.308,00	Bertambahnya biaya administrasi pinjaman kepada BJB; biaya provisi, jasa notaris, bunga pinjaman dan Bertambahnya Alokasi Dana Desa (ADD) dampak dari bertambahnya kenaikan pendapatan asli daerah diluar pendapatan BLUD
04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1.663.125.000,00	
08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	60.447.975.977,00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	64.750.304.300,00	
09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	4.060.484.500,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	320.144.495,00	
10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	16 Laporan	5.177.334.713,00	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	16 Laporan	5.428.067.513,00	
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKPD	Manajemen Aset	100%	606.378.600,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKPD	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	560.553.400,00	
01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	606.378.600,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	560.553.400,00	Berkurang karena efisiensi anggaran serta Percepatan pensertifikatan tanah milik pemkot ke BPN dengan target 150 sertifikat
01	Penyusunan Standar Harga	BPKPD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan Standar Harga	BPKPD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	89.240.000,00	
03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	7.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	6.945.000,00	

NO	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	162.267.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	121.162.500,00	
06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	69.299.200,00	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	49.399.000,00	
07	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 Laporan	153.893.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	180.798.000,00	
10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	9 Dokumen	54.336.000,00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	61.226.000,00	
11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6 Laporan	38.152.500,00	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6 Laporan	35.840.500,00	
12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	7.636.400,00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	7.617.400,00	
13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	41 Orang	13.794.500,00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	41 Orang	8.325.000,00	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKPD	Rasio PAD	2,5	1.364.983.400,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKPD	Rasio PAD	2,5	1.168.432.759,00	
			Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD					Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD			
01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD	Cakupan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	1.364.983.400,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPD	Cakupan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	1.168.432.759,00	Berkurang karena efisiensi anggaran
01	Perencanaan Pengelolaan pajak daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	21.761.500,00	Perencanaan Pengelolaan pajak daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	17.845.000,00	
02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	29.593.250,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	50.449.125,00	
03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	167.344.500,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	78.630.000,00	
04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	345.050.900,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	248.173.900,00	

NO	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT/INDIKATOR KINERJA	TARGET OUTPUT	PAGU INDIKATIF(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	29.894.600,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	19.703.000,00	
08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	74.235.800,00	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	114.493.500,00	
11	Penagihan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	650.981.250,00	Penagihan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	576.113.063,00	
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	46.121.600,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	63.025.171,00	

Berdasarkan tabel di atas, Perubahan Rencana Kerja BPKPD Kota Banjar Tahun 2025 jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan sebanyak 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 79 (tujuh puluh sembilan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebanyak Rp86.137.720.293,00.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi Rancangan RKPD dan usulan pemangku kepentingan musyawarah rencana pembangunan pada tingkat kelurahan dan kecamatan. Adapun usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat sebagai berikut:

No	Usulan	Lokasi	Permasalahan	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Pemutakhiran Data Tanah	Desa Cibeureum	Data tanah dan peta masih menggunakan desa lama, Pemekaran wilayah desa	-	Tidak dapat dianggarkan, karena keterbatasan anggaran
2.	Sarana dan Prasarana Kolektor PBB dan Sub Kolektor PBB	Desa Cibeureum	Masih sering terjadi keterlambatan pelunasan PBB dan masih terdapat data PBB yang tidak akurat	-	Tidak dapat dianggarkan, karena keterbatasan anggaran
3.	Pemutakhiran Data Tanah	Kelurahan Hegarsari	Pemutakhiran Data PBB juga dilaksanakan pengukuran tanah yang belum bersertifikat	-	Tidak dapat dianggarkan, karena keterbatasan anggaran
4.	Sarana dan Prasarana Kolektor PBB dan Sub Kolektor PBB	Kelurahan Hegarsari	Memudahkan para kolektor dan sub kolektor	-	Diterima selama ketersediaan anggaran memadai

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi.

Visi Kementerian Keuangan adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya :

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Kementerian Keuangan, telah menetapkan sepuluh sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:
 - a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan
 - c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025. Penyusunan RPJP Daerah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan membuat visi, misi, serta arah pembangunan jangka panjang daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 ini merupakan revisi dokumen RPJPD sebelumnya. Revisi RPJPD dilakukan akibat laju perkembangan yang dinamis dan sangat cepat di wilayah Jawa Barat sehingga mempengaruhi prediksi kondisi pembangunan jangka panjang ke depan. Berbagai target pencapaian hasil, strategi, kebijakan dan program perlu dirumuskan kembali untuk menjamin terlaksananya dan tercapainya keberhasilan pembangunan pada masa mendatang dengan pencapaian

tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Kerangka pemikiran dalam penyusunan revisi RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 didasarkan pada kecenderungan tersebut untuk menjamin terselenggaranya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat 2005–2025 merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 merupakan pedoman dalam:

1. Penyusunan RTRW Provinsi, RPJM Daerah, Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan RKPD, Renja Organisasi Perangkat Daerah, serta dokumen perencanaan lainnya dan penyelenggaraan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat;
2. Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/ Kota, RTRW Kabupaten/ Kota, RPJM Daerah Kabupaten/ Kota, Renstra Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota, Renja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota, RKPD Kabupaten/ Kota;
3. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu antar fungsi pemerintah daerah maupun antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
4. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi daerah serta nasional;
5. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
6. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 sangat bergantung pada komitmen antara penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2026 yang hendak dicapai adalah “Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan”. Untuk mencapai visi Kota Banjar tersebut, dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).
4. Mewujudkan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM).
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan.
6. Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah. Pada Tahun 2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar memiliki 3 (tiga) tujuan utama yaitu:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah.

Tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah memiliki 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

- a. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;

Adapun indikator dari sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

- 1) Penetapan APBD dengan target tepat waktu;
- 2) realisasi belanja APBD dengan target 94%;
- 3) LKD sesuai dan tepat waktu dengan target 100%; dan
- 4) penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan target tepat waktu.

- b. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Adapun indikator dari sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu Laporan BMD sesuai dan tepat waktu dengan target 100%.

2. Meningkatkan Pengelolaan Pajak Daerah

Tujuan Meningkatkan Pengelolaan Pajak Daerah memiliki sasaran strategis “Meningkatkan Pajak Daerah” dengan indikator utama Pertumbuhan Pajak Daerah, adapun target pada Tahun 2025 adalah sebesar 2,5 (dua koma lima) %.

3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah

Tujuan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah memiliki sasaran strategis ”Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator utama Pertumbuhan Nilai SAKIP OPD dengan target Tahun 2025 yaitu sebesar 1 (satu) % .

Gambaran tentang tujuan dan sasaran rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2025 diuraikan dengan tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPKPD Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah		Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	100%
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD	Tepat Waktu
			Realisasi Belanja APBD	94%
			LKPD sesuai dan tepat waktu	100%
			Penetapan RAPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat Waktu
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan BMD sesuai dan tepat waktu	100%		
2	Meningkatkan Pengelolaan Pajak Daerah		Realisasi Pajak Daerah	100%
		Meningkatnya Pajak Daerah	Pertumbuhan Pajak Daerah	2,5%
3	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah		Kategori SAKIP OPD	BB 74,08
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Pertumbuhan Nilai SAKIP OPD	1%

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu indikatif yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banjar Tahun 2024-2026 dijabarkan dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas. Adapun pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar.

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar disesuaikan dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 77 (tujuh puluh tujuh) sub kegiatan, dengan uraian

program, kegiatan, sub kegiatan dan sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersebar ke berbagai wilayah se-Kota Banjar

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah :

a) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
- 3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD.
- 4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD.
- 5) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD.
- 6) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD.
- 7) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- 8) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- 9) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.
- 10) Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

b) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.
- 2) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
- 3) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).
- 5) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait.

- 6) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.
 - 7) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - 1) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah.
 - 2) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban.
 - 3) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran.
 - 4) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
 - 6) Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
 - 7) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah.
 - d) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1) Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah.
 - 2) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.
 - 3) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
 - 4) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- a) Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 1) Penyusunan Standar Harga.
 - 2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.
 - 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah.
 - 4) Inventarisasi Barang Milik Daerah.
 - 5) Pengamanan Barang Milik Daerah.

- 6) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
 - 7) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
 - 8) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
 - 9) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- a) Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
 - 1) Perencanaan Pengelolaan pajak daerah.
 - 2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
 - 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
 - 4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.
 - 5) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.
 - 6) Penetapan Wajib Pajak Daerah.
 - 7) Penagihan Pajak Daerah.
 - 8) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

B. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terfokus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD.
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

- c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.
- e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
 - 10) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Mebel.
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

3. Jika Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak Sesuai dengan Rancangan Awal RKPD

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar tahun 2025 telah menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana tersebut di atas.

Kebutuhan anggaran akan sangat berdampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai dukungan pencapaian visi dan misi kepala daerah, adapun ketidaksesuaian pagu anggaran yang diberikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar, maka pemenuhan kebutuhan anggaran akan disesuaikan dengan skala prioritas program dan kegiatan.

4. Tabel Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, oleh karena itu sebagian besar program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2026 dan rancangan awal Rencana Kerja berubah ke program dan kegiatan yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Adapun Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5 02	KEUANGAN									
	5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan		43,33	73.274.051.733,00				43,33	71.528.884.490,00
			Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)		90,9					90,90	
			Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya		5,19					5,19	
			Opini Laporan Keuangan		WTP					WTP	
			Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD		0,4					0,4	
			Persentase Akses publik terhadap informasi keuangan daerah		100					100	
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100,00%	387.796.425,00				100,00%	1.049.743.650,00	
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	BPKPD	2 Dokumen	34.601.250,00	DAU			2 Dokumen	119.956.500,00	

Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	BPKPD	2 Dokumen	65.826.500,00	DAU		2 Dokumen	119.974.250,00
	5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	BPKPD	30 Dokumen	2.486.500,00	DAU		30 Dokumen	103.629.500,00
	5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	BPKPD	30 Dokumen	21.414.500,00	DAU		30 Dokumen	102.776.000,00
	5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	BPKPD	30 Dokumen	53.398.700,00	DAU		30 Dokumen	91.921.500,00
	5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	BPKPD	30 Dokumen	27.429.500,00	DAU		30 Dokumen	62.860.000,00
	5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKPD	2 Dokumen	78.512.400,00	DAU		2 Dokumen	218.424.800,00
	5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKPD	2 Dokumen	79.002.500,00	DAU		2 Dokumen	155.402.500,00
	5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKPD	1 Dokumen	18.624.575,00	DAU		1 Dokumen	49.942.300,00
	5 02 02 2.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	100 Orang	6.500.000,00	DAU		100 Orang	24.856.300,00
	5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100,00%	425.083.500,00			100,00%	473.559.000,00
	5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKPD	76 Dokumen	98.716.700,00	DAU		76 Dokumen	101.463.200,00
	5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKPD	78 Dokumen	70.503.800,00	DAU		78 Dokumen	70.503.800,00

Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKPD	4 Dokumen	114.095.300,00	DAU		4 Dokumen	138.464.000,00
	5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKPD	48 Laporan	40.337.000,00	DAU		48 Laporan	36.377.000,00
	5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKPD	38 Dokumen	50.191.800,00	DAU		38 Dokumen	59.071.800,00
	5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKPD	5 Dokumen	8.810.000,00	DAU		5 Dokumen	8.810.000,00
	5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	120 Orang	42.428.900,00	DAU		120 Orang	58.869.200,00

Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100,00%	299.530.500,00			100,00%	319.786.650,00
	5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKPD	12 Laporan	33.534.400,00	DAU		12 Laporan	33.602.000,00
	5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	BPKPD	1 Dokumen	19.428.000,00	DAU		1 Dokumen	19.554.400,00
	5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan dan Semesteran	BPKPD	12 Laporan	17.621.000,00	DAU		12 Dokumen	17.621.150,00
	5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	BPKPD	82 Laporan	129.948.200,00	DAU		82 Dokumen	144.160.200,00
	5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APDB Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKPD	2 Dokumen	72.886.000,00	DAU		2 Dokumen	78.622.000,00
	5 02 02 2.03 06	Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKPD	1 Dokumen	9.886.000,00	DAU		1 Dokumen	10.000.000,00

Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKPD	1 Dokumen	16.226.900,00	DAU		1 Dokumen	16.226.900,00
	5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100,00%	72.161.641.308,00			100,00%	69.685.795.190,00
	5 02 02 2.04 04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	BPKPD	1 Laporan	1.663.125.000,00	DAU		1 Laporan	-
	5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKPD	1 Laporan	64.750.304.300,00	DAU		1 Laporan	60.447.975.977,00
	5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKPD	1 Laporan	320.144.495,00	DAU		1 Laporan	4.060.484.500,00
	5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKPD	16 Laporan	5.428.067.513,00	DAU		16 Laporan	5.177.334.713,00
	5 02 03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajemen Aset		100,00%	560.553.400,00			100,00%	606.378.600,00
	5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah		100,00%	560.553.400,00			100,00%	606.378.600,00
	5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	BPKPD	1 Dokumen	89.240.000,00	DAU		2 Dokumen	100.000.000,00
	5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKPD	2 Dokumen	6.945.000,00	DAU		1 Dokumen	7.000.000,00
	5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKPD	4 Laporan	121.162.500,00	DAU		1 Laporan	162.267.000,00
	5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	BPKPD	2 Laporan	49.399.000,00	DAU		1 Laporan	69.299.200,00
	5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKPD	4 Laporan	180.798.000,00	DAU		4 Laporan	153.893.000,00

Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKPD	2 Dokumen	61.226.000,00	DAU		4 Dokumen	54.336.000,00
	5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	6 Laporan	35.840.500,00	DAU		5 Laporan	38.152.500,00
	5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	BPKPD	2 Laporan	7.617.400,00	DAU		2 Laporan	7.636.400,00
	5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	41 Orang	8.325.000,00	DAU		41 Orang	13.794.500,00
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	5 02 04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD	2,5		1.168.432.759,00			2,5	1.364.983.400,00
			Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD							
	5 02 04 2.02	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Cakupan Pengelolaan pendapatan Daerah		100,00%	1.168.432.759,00			100,00%	1.364.983.400,00
	5 02 04 2.02 01	Perencanaan Pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	BPKPD	2 Dokumen	17.845.000,00	PAD		2 Dokumen	21.761.500,00
	5 02 04 2.02 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	1 Dokumen	50.449.125,00	PAD		1 Dokumen	29.593.250,00
	5 02 04 2.02 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	4 Laporan	78.630.000,00	PAD		4 Laporan	167.344.500,00
	5 02 04 2.02 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BPKPD	1 Unit	248.173.900,00	PAD		1 Unit	345.050.900,00

Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5 02 04 2.02 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	BPKPD	1 Laporan	19.703.000,00	PAD		1 Laporan	29.894.600,00
	5 02 04 2.02 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	BPKPD	1 Dokumen	114.493.500,00	PAD		1 Dokumen	74.235.800,00
	5 02 04 2.02 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	BPKPD	1 Dokumen	576.113.063,00	PAD		1 Dokumen	650.981.250,00
	5 02 04 2.02 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	BPKPD	1 Dokumen	63.025.171,00	PAD		1 Dokumen	46.121.600,00
JUMLAH TOTAL						75.003.037.892,00				73.500.246.490,00

Berdasarkan data tabel di atas, program, kegiatan dan Sub kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2025 terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu perubahan Tahun 2025 sebesar Rp73.274.051.733,00. Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan. Indikator dari Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan, dengan target pada Tahun 2025 adalah sebesar 43,33%;
 - b. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures), dengan target pada Tahun 2025 adalah sebesar 90,9%;
 - c. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya, dengan target pada Tahun 2025 adalah sebesar 5,19%;
 - d. Opini Laporan Keuangan, dengan target pada Tahun 2025 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian);
 - e. Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD, dengan target pada Tahun 2025 adalah sebesar 0,4%; dan
 - f. Persentase Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah, dengan target pada Tahun 2025 adalah sebesar 100%.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan pagu perubahan Tahun 2025 sebesar Rp560.553.400,00. Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan. Indikator dari Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu Manajemen Aset dengan target pada Tahun 2025 adalah 100%.
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan pagu perubahan Tahun 2025 sebesar Rp1.168.432.759,00. Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan. Indikator dari Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu Rasio PAD dengan target pada Tahun 2025 adalah 2,5%.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANJAR

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Penerima Manfaat	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Sumber Anggaran	Ket.
				Output Kegiatan					
				Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5 02	KEUANGAN								
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	11.134.682.401,00	12.726.064.778,00		
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	7.755.500,00	26.126.000,00		
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.299.900,00	7.947.000,00	DAU	
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.579.500,00	2.649.000,00	DAU	
5 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.582.500,00	2.792.000,00	DAU	
5 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	621.600,00	1.942.000,00	DAU	
5 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	621.600,00	2.662.000,00	DAU	
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	947.000,00	4.134.000,00	DAU	
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.103.400,00	4.000.000,00	DAU	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Penerima Manfaat	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Sumber Anggaran	Ket.
				Output Kegiatan					
				Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	8.954.109.746,00	9.617.325.078,00		
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKPD	BPKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/Bulan	8.867.303.846,00	9.556.534.828,00	PAD, DAU	
5 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	350 Dokumen	81.868.500,00	53.165.550,00	DAU	
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	4.937.400,00	7.624.700,00	DAU	
5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,00%	59.715.000,00	39.222.500,00		
5 02 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BPKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	37.930.000,00	39.222.500,00	DBH	
5 02 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	21.785.000,00	-	DBH	
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	32.657.000,00	124.688.400,00		
5 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKPD	BPKPD	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	DAU	
5 02 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BPKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100 Dokumen	32.657.000,00	94.688.400,00	DAU	
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPKPD	BPKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	DAU	
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKPD	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	-	30.000.000,00	DAU	
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	497.243.180,00	661.923.500,00		
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKPD	BPKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	41.197.000,00	41.197.000,00	DAU	
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKPD	BPKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	115.636.400,00	DAU	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Penerima Manfaat	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Sumber Anggaran	Ket.
				Output Kegiatan					
				Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKPD	BPKPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	23.900.680,00	30.000.000,00	DAU	
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKPD	BPKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.420.000,00	30.420.900,00	DAU	
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKPD	BPKPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	94.614.000,00	86.014.000,00	DAU	
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	45 Dokumen	2.025.000,00	14.619.000,00	DAU	
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.670.000,00	14.656.000,00	DAU	
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	157.500.000,00	216.889.000,00	DAU	
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	43.259.500,00	43.191.200,00	DAU	
5 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	67.657.000,00	69.300.000,00	DAU	
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	104.527.000,00	80.124.000,00		
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKPD	BPKPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	-	DAU	
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	BPKPD	BPKPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	54.297.000,00	-	DAU	
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	BPKPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	50.230.000,00	80.124.000,00	DAU	
5 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKPD	BPKPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	DAU	
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	771.228.175,00	1.503.006.900,00		
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	400.026.000,00	788.644.800,00	DBH	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Penerima Manfaat	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Sumber Anggaran	Ket.
				Output Kegiatan					
				Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	371.202.175,00	714.362.100,00	DAU	
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	707.446.800,00	673.648.400,00		
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKPD	BPKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	301.639.600,00	301.674.000,00	DAU	
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKPD	BPKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	78.525.000,00	78.555.000,00	DAU	
5 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	BPKPD	BPKPD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	44 Unit	-	21.000.000,00	DAU	
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	BPKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	188.180.000,00	89.010.000,00	DAU	
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKPD	BPKPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	104.594.000,00	128.386.000,00	DAU	
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKPD	BPKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	34.508.200,00	55.023.400,00	DAU	
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	43,33	73.274.051.733,00	71.528.884.490,00		
				Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	90,90				
				Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	5,19				
				Opini Laporan Keuangan	WTP				
				Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	0,4				
				Persentase Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100				

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Penerima Manfaat	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Sumber Anggaran	Ket.
				Output Kegiatan					
				Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100,00%	387.796.425,00	1.049.743.650,00		
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKPD	OPD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	34.601.250,00	119.956.500,00	PAD	
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKPD	OPD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	65.826.500,00	119.974.250,00	PAD	
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKPD	OPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	2.486.500,00	103.629.500,00	DAU	
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKPD	OPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	21.414.500,00	102.776.000,00	DAU	
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKPD	OPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	53.398.700,00	91.921.500,00	DAU	
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKPD	OPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	27.429.500,00	62.860.000,00	DAU	
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKPD	OPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	78.512.400,00	218.424.800,00	DAU	
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKPD	OPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	79.002.500,00	155.402.500,00	DAU	
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKPD	OPD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	18.624.575,00	49.942.300,00	DAU	
5 02 02 2.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	OPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	6.500.000,00	24.856.300,00	DAU	
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			Cakupan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100,00%	425.083.500,00	473.559.000,00		
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKPD	OPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	76 Dokumen	98.716.700,00	101.463.200,00	DAU	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Penerima Manfaat	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Sumber Anggaran	Ket.
				Output Kegiatan					
				Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKPD	OPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	78 Dokumen	70.503.800,00	70.503.800,00	DAU	
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKPD	OPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	114.095.300,00	138.464.000,00	DAU	
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKPD	OPD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	48 Laporan	40.337.000,00	36.377.000,00	DAU	
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKPD	OPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	38 Dokumen	50.191.800,00	59.071.800,00	DAU	
5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKPD	OPD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5 Dokumen	8.810.000,00	8.810.000,00	DAU	
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	OPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	42.428.900,00	58.869.200,00	DAU	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Penerima Manfaat	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Sumber Anggaran	Ket.
				Output Kegiatan					
				Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100,00%	299.530.500,00	319.786.650,00		
5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKPD	OPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	33.534.400,00	33.602.000,00	DAU	
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKPD	OPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	19.428.000,00	19.554.400,00	DAU	
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	BPKPD	OPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	17.621.000,00	17.621.150,00	DAU	
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPD	OPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	82 Laporan	129.948.200,00	144.160.200,00	DAU	
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKPD	OPD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	72.886.000,00	78.622.000,00	DAU	
5 02 02 2.03 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKPD	OPD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	9.886.000,00	10.000.000,00	DAU	
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKPD	OPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	16.226.900,00	16.226.900,00	DAU	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Penerima Manfaat	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Sumber Anggaran	Ket.
				Output Kegiatan					
				Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			Cakupan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00%	72.161.641.308,00	69.685.795.190,00		
5 02 02 2.04 04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	BPKPD	OPD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1.663.125.000,00	-	DAU, DD	
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKPD	Desa/Kel	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	64.750.304.300,00	60.447.975.977,00	DAU, DD	
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKPD	OPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	320.144.495,00	4.060.484.500,00	DAU, DBH	
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	BPKPD	Desa/Kel	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	16 Laporan	5.428.067.513,00	5.177.334.713,00	PAD	
5 02 03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			Manajemen Aset	100,00%	560.553.400,00	606.378.600,00		
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100,00%	560.553.400,00	606.378.600,00		
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	BPKPD	OPD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	89.240.000,00	100.000.000,00	DAU	
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKPD	OPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	6.945.000,00	7.000.000,00	DAU	
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKPD	OPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	121.162.500,00	162.267.000,00	DAU	
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKPD	OPD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	49.399.000,00	69.299.200,00	DAU	
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKPD	OPD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	180.798.000,00	153.893.000,00	DAU	
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKPD	OPD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	61.226.000,00	54.336.000,00	DAU	
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	OPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6 Laporan	35.840.500,00	38.152.500,00	DAU	
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKPD	OPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	7.617.400,00	7.636.400,00	DAU	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Penerima Manfaat	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Sumber Anggaran	Ket.
				Output Kegiatan					
				Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	OPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	41 Orang	8.325.000,00	13.794.500,00	DAU	
5 02 04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			Rasio PAD	2,5	1.168.432.759,00	1.364.983.400,00		
				Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD					
5 02 04 2.02	Kegiatan Pengelolaan pendapatan daerah			Cakupan Pengelolaan pendapatan Daerah	100,00%	1.168.432.759,00	1.364.983.400,00		
5 02 04 2.02 01	Perencanaan Pengelolaan pajak daerah	BPKPD	OPD Penghasil	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	17.845.000,00	21.761.500,00	DAU	
5 02 04 2.02 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	OPD Penghasil	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	50.449.125,00	29.593.250,00	DAU	
5 02 04 2.02 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	Wajib Pajak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	78.630.000,00	167.344.500,00	DAU	
5 02 04 2.02 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BPKPD	OPD Penghasil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	248.173.900,00	345.050.900,00	DAU	
5 02 04 2.02 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPKPD	Wajib Pajak	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	19.703.000,00	29.894.600,00	DAU	
5 02 04 2.02 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BPKPD	Wajib Pajak	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	114.493.500,00	74.235.800,00	DAU	
5 02 04 2.02 11	Penagihan Pajak Daerah	BPKPD	Wajib Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	576.113.063,00	650.981.250,00	DAU	
5 02 04 2.02 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BPKPD	Wajib Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	63.025.171,00	46.121.600,00	DAU	
Jumlah Usulan Musrenbang (1)						-			
Jumlah Usulan Renja (2)						86.137.720.293,00	86.226.311.268,00		
Jumlah Usulan Pokir (3)						-			
Jumlah Total (1+2+3)						86.137.720.293,00	86.226.311.268,00		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kota Banjar yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kota Banjar. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kota Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar yang perlu mendapat perhatian adalah keterbatasan dana dalam pelaksanaan kegiatan serta pemahaman terkait penyusunan dokumen perubahan rencana kerja yang mendukung kebijakan pusat dan provinsi serta mendukung visi misi kepala daerah. Pelaksanaan semua Program/ kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar.

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 serta diselaraskan dengan Perubahan RKPD Kota Banjar Tahun 2025;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kota Banjar Tahun 2025;
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2025.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selain sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Untuk dapat merealisasikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja BPKPD Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi

oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Anggaran yang memadai dimanfaatkan sebaik mungkin guna melaksanakan berbagai kegiatan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 128 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah. Serta diharapkan dapat mewujudkan outcome dan output dari program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah serta ikut mendukung mewujudkan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar.

Disamping itu Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah juga memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Demikian Penyusunan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar tahun 2025 yang telah disusun ini, diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar.

Banjar, 17 September 2025
Kepala BPKPD,



ASEP MULYANA, S.E., M.M.
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 19761004 200312 1 004